

PERKEMBANGAN TRIWULANAN **EKONOMI** **PROVINSI BALI**

Triwulan II 2026

Volume 13, Nomor 3, 2026



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

PERKEMBANGAN TRIWULANAN

EKONOMI PROVINSI BALI

Triwulan II 2026

Volume 13, Nomor 3, 2026

<https://bali.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI



Perkembangan Triwulanan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan II 2026

Volume 13, Nomor 3, 2026

Katalog	: 9101003.51
ISSN	: 2477-779X
Nomor Publikasi	: 51000.26029
Ukuran Buku	: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	: xii+55 halaman
Penyusun Naskah	: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Pembuat Kover	: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Penerbit	: ©Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Sumber Ilustrasi	: freepik.com, unsplash.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Tim Penyusun

Perkembangan Triwulanan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan II 2026 Volume 13, Nomor 3, 2026

Pengarah:

Agus Gede Hendrayana Hermawan

Penanggung Jawab:

Ni Nyoman Jegeg Puspawati

Penyunting:

Ni Nyoman Jegeg Puspawati

Penulis Naskah:

I Gede Heprin Prayasta
Panca Dwi Prabawa
Ni Made Inna Dariwardani

Pengolah Data:

I Gede Heprin Prayasta

Penata Letak:

I Gede Heprin Prayasta



Kata Pengantar

Publikasi “Perkembangan Triwulanan Ekonomi Provinsi Bali” merupakan salah satu wujud bagaimana data statistik dapat berbicara dan memberikan *insight*. Tampilan semi infografis serta narasi mendetail dalam publikasi ini diharapkan dapat mudah dipahami oleh pengguna data. Informasi yang dimuat dalam publikasi ini merupakan perkembangan capaian Provinsi Bali khususnya di bidang ekonomi dan sosial dalam periode triwulanan. Informasi tersebut terdiri dari indikator Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian, Pariwisata, serta Ekspor dan Impor.

Pada edisi Triwulan II-2026 (April, Mei, dan Juni), peningkatan nilai tambah aktivitas ekonomi di Provinsi Bali mencerminkan kuatnya kinerja perekonomian daerah sekaligus konsistensi kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Selain itu, perbaikan capaian berbagai indikator sosial ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Bali senantiasa didukung oleh fondasi ekonomi yang semakin solid dan berkelanjutan.

Melalui publikasi ini, BPS Provinsi Bali mengharapkan agar para pengguna data dapat memahami persoalan Bali dengan lebih mudah dan tepat. Kami juga membuka ruang bagi saran dan masukan dalam penyempurnaan publikasi ini ke depan. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini kami ucapkan terima kasih.



Denpasar, September 2026
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Bali

Agus Gede Hendrayana Hermawan





Daftar Isi

Perkembangan Triwulanan
Ekonomi Provinsi Bali Triwulan II 2026
Volume 13, Nomor 3, 2026

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Bab I Pertumbuhan Ekonomi	1
Bab II Inflasi	13
Bab III Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian	25
Bab IV Pariwisata	35
Bab V Ekspor dan Impor	47
Daftar Pustaka	55



Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali (persen), Triwulan II 2024 s.d. Triwulan II 2026 3
Gambar 1.2	Lima Lapangan Usaha dengan Distribusi PDRB Terbesar di Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2026 . 5
Gambar 1.3	Lima Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Ekonomi <i>Y-on-Y</i> Terbesar di Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2026 5
Gambar 1.4	Distribusi PDRB Menurut Komponen Pengeluaran di Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2026 7
Gambar 1.5	Pertumbuhan Ekonomi <i>Y-on-Y</i> Menurut Komponen Pengeluaran di Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2026 7
Gambar 1.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi <i>Y-on-Y</i> di Provinsi Bali dan Indonesia (persen), Triwulan I-2020 s.d. Triwulan II-2026 9
Gambar 1.7	Kontribusi PDRB Provinsi Bali terhadap Perekonomian Indonesia (persen), 2020 s.d. Triwulan II-2026 9
Gambar 1.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi <i>Y-on-Y</i> Menurut Provinsi (persen), Triwulan II-2026 10
Gambar 2.1	Perkembangan Inflasi Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2025 s.d. Triwulan II-2026 15
Gambar 2.2	Perkembangan Inflasi Menurut Cakupan Wilayah IHK Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2025 s.d. Triwulan II-2026 17
Gambar 2.3	Andil Inflasi <i>M-to-M</i> Provinsi Bali Menurut Kelompok Pengeluaran (persen), Triwulan II-2026 ... 19
Gambar 2.4	Lima Komoditas Penyumbang Utama Inflasi/Deflasi <i>M-to-M</i> Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2026 19

Gambar 2.5	Andil Inflasi <i>Y-on-Y</i> Provinsi Bali Menurut Kelompok Pengeluaran (persen), Triwulan II-2026	21
Gambar 2.6	Lima Komoditas Penyumbang Utama Inflasi <i>Y-on-Y</i> Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2026	21
Gambar 3.1	Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Indikator Penyusunnya di Provinsi Bali, Triwulan II-2025 s.d. Triwulan II-2026	26
Gambar 3.2	Perkembangan Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor di Provinsi Bali, Triwulan II-2025 s.d. Triwulan II-2026	27
Gambar 3.3	Perkembangan Nilai Tukar Usaha Pertanian dan Indikator Penyusunnya di Provinsi Bali, Triwulan II-2025 s.d. Triwulan II-2026	30
Gambar 3.4	Perkembangan Nilai Tukar Usaha Pertanian Menurut Subsektor di Provinsi Bali, Triwulan II-2025 s.d. Triwulan II-2026	32
Gambar 4.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali, Triwulan I-2019 s.d. Triwulan II-2026	38
Gambar 4.2	Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Lima Negara/Wilayah/Entitas Tertentu Terbesar di Provinsi Bali, Triwulan II-2025 dan Triwulan II-2026	39
Gambar 4.3	Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Menurut Jenis Hotel di Provinsi Bali (persen), Triwulan I-2019 s.d. Triwulan II-2026	41
Gambar 4.4	Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Menurut Klasifikasi Hotel Berbintang di Provinsi Bali (persen), Triwulan I-2025 s.d. Triwulan II-2026 ..	41
Gambar 4.5	Perkembangan Rata-Rata Lama Menginap Menurut Kategori Hotel di Provinsi Bali (malam), Triwulan I-2019 s.d. Triwulan II-2026	42
Gambar 4.6	Perkembangan Rata-Rata Lama Menginap Menurut Kategori Hotel dan Tamu di Provinsi Bali (malam), Triwulan I-2024 s.d. Triwulan II-2026	42

Gambar 5.1	Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Provinsi Bali (juta US\$), Triwulan I-2023 s.d. Triwulan II-2026	47
Gambar 5.2	Persentase Ekspor Provinsi Bali Menurut Lima Negara/Wilayah/Entitas Tertentu Tujuan Utama, Triwulan II-2025 dan Triwulan II-2026	48
Gambar 5.3	Persentase Impor Provinsi Bali Menurut Lima Negara/Wilayah/Entitas Tertentu Asal Utama, Triwulan II-2025 dan Triwulan II-2026	49
Gambar 5.4	Persentase Ekspor Menurut Sektor dan Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang di Provinsi Bali, Triwulan II-2026	50
Gambar 5.5	Persentase Ekspor dan Impor Provinsi Bali Menurut Lima Komoditas Utama, Triwulan II-2026	52

<https://bali.bps.go.id>



Bab I

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun,

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Saat ini, digunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar penghitungan PDRB.

PDRB dapat dihitung dengan 3 pendekatan yaitu produksi, pengeluaran dan pendapatan. Pada praktiknya, PDRB sampai saat ini hanya dihitung dengan pendekatan produksi dan pengeluaran karena terkait dengan sumber data yang tersedia.

- **PDRB menurut lapangan usaha** adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 17 kategori
- **PDRB menurut pengeluaran** adalah besaran nilai produk barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan di dalam suatu daerah untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRRT), dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (merupakan ekspor dikurang impor).

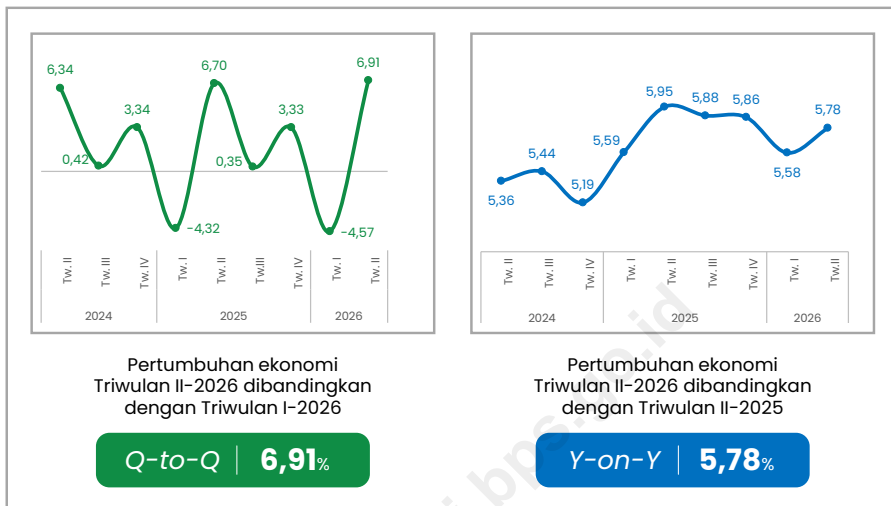
Distribusi/kontribusi adalah sumbangan dari setiap satuan unit terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase. Nilai ini dihitung dari PDRB ADHB.

Laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk melihat perkembangan nilai PDRB ADHK 2010 pada suatu periode tertentu dalam satuan persen.

Sumber pertumbuhan/Source of Growth (SoG) adalah andil dari masing-masing lapangan usaha/komponen terhadap besaran laju pertumbuhan. Penghitungan SOG didasarkan pada nilai ADHK 2010.

Bab I

Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2024 s.d. Triwulan II-2026

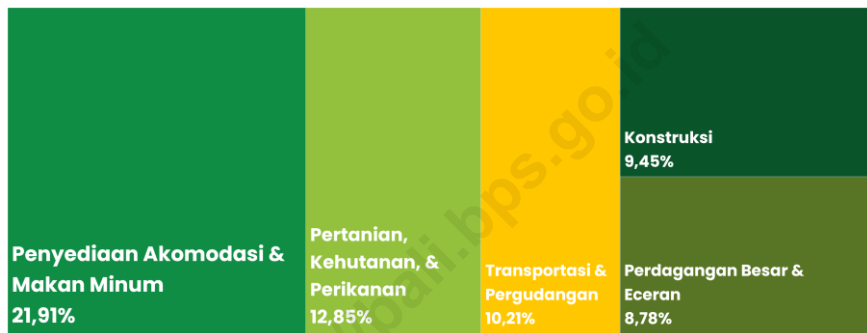
Capaian perekonomian Bali yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode Triwulan II-2026 tumbuh hingga 6,91 persen dibandingkan dengan Triwulan I-2026 (*quarter-to-quarter*). Pertumbuhan tersebut cenderung sejalan dengan pola musiman yang umumnya terjadi pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp89,27 triliun dan atas dasar harga konstan (2010=100) sebesar Rp47,34 triliun, mencerminkan kinerja perekonomian Bali yang tetap solid dan masif meskipun dalam situasi gejolak ketidakpastian global.

Perekonomian Bali pada Triwulan II-2026 mengalami peningkatan sebesar 6,91 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (*quarter-to-quarter*). Peningkatan kinerja ekonomi ini dipengaruhi oleh berbagai momentum ekonomi yang terjadi pada April hingga Juni 2026. Perayaan hari besar keagamaan, seperti Idul Adha serta Galungan dan Kuningan, mendorong peningkatan permintaan masyarakat yang selanjutnya berkontribusi terhadap penguatan aktivitas produksi di berbagai lapangan usaha. Pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga turut menopang daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan memberikan stimulus terhadap kinerja lapangan usaha yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata sebagai kontributor utama perekonomian Bali. Selain itu, realisasi proyek konstruksi juga turut mendukung peningkatan pembentukan nilai tambah yang secara keseluruhan terakumulasi pada capaian ekonomi Bali Triwulan II-2026.

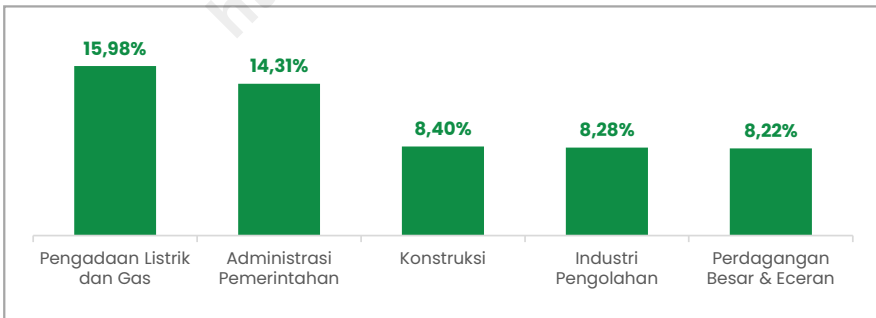
Selanjutnya, capaian perekonomian Bali pada Triwulan II-2026 tetap mencatatkan pertumbuhan yang kokoh secara *year-on-year*. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh 16 dari 17 kategori lapangan usaha yang tumbuh positif. Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mencatat pertumbuhan tertinggi, seiring meningkatnya konsumsi listrik pada seluruh segmen pelanggan. Sementara itu, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib turut menguat didukung peningkatan realisasi belanja pemerintah, khususnya belanja pegawai dan belanja modal. Selanjutnya, Lapangan Usaha Konstruksi menunjukkan pertumbuhan yang cukup mengesankan didorong oleh peningkatan realisasi berbagai proyek konstruksi, baik proyek pemerintah maupun swasta.

Dominasi aktivitas pariwisata tercermin pada struktur ekonomi Bali Triwulan II-2026 yang masih ditopang oleh Lapangan Usaha Penyediaan

Akomodasi serta Makan dan Minum yaitu sebesar 21,91 persen (Gambar 1.2). Kontribusi tersebut meningkat dibandingkan Triwulan I-2026 yang tercatat sebesar 20,95 persen. Sebagai pendukung aktivitas pariwisata di Provinsi Bali, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan serta Perdagangan Besar dan Eceran turut mendominasi struktur ekonomi Bali dengan kontribusi masing-masing sebesar 10,21 persen dan 8,78 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang sebesar 12,85 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan Triwulan I-2026 yang memberikan kontribusi sebesar 13,33 persen.



Gambar 1.2 Lima Lapangan Usaha dengan Distribusi PDRB Terbesar di Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2026



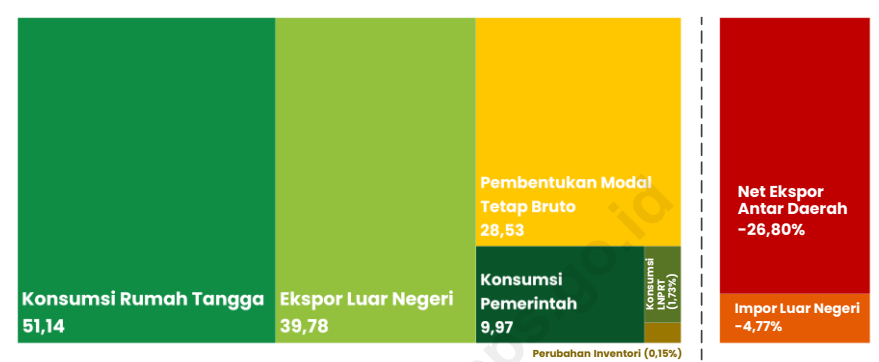
Gambar 1.3 Lima Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Ekonomi Y-on-Y Terbesar di Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2026

Kinerja Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas menguat seiring meningkatnya konsumsi listrik yang secara keseluruhan tumbuh 14,60 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada segmen residensial sebesar 20,38 persen. Konsumsi pada segmen bisnis dan industri juga meningkat masing-masing 10,04 persen dan 13,50 persen. Di sisi lain, penguatan aktivitas Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib didukung oleh meningkatnya realisasi belanja pemerintah, khususnya belanja pegawai dan penyusutan belanja modal. Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya total realisasi belanja baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

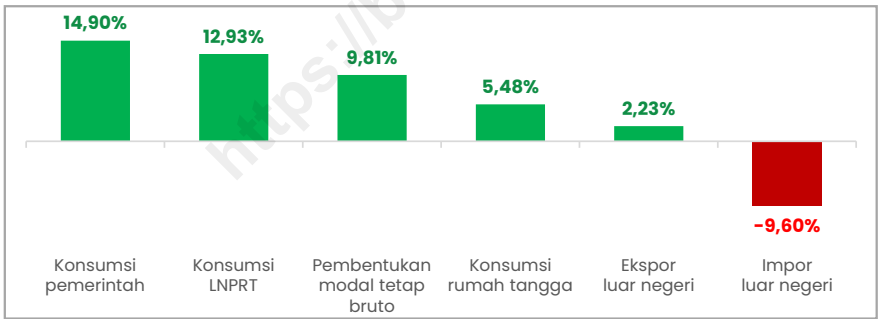
Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang merupakan salah satu penopang utama perekonomian Bali tetap mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,68 persen, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan Triwulan II-2025. Kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya aktivitas penyediaan makan minum dan jasa akomodasi, khususnya pada hotel bintang lima. Sejalan dengan itu, jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh sebesar 3,54 persen, sementara Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang meningkat sebesar 0,97 persen poin, terutama pada hotel bintang lima yang naik 4,32 persen poin. Peningkatan aktivitas pariwisata tersebut turut mendorong pembentukan nilai tambah pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Struktur ekonomi Bali pada Triwulan II-2026 dari sisi PDRB menurut pengeluaran masih menunjukkan pola yang relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tetap menjadi penopang utama dengan kontribusi mencapai 51,14 persen terhadap total perekonomian Bali (Gambar 1.4). Di sisi lain, kuatnya aktivitas pariwisata juga tercermin dari besarnya kontribusi ekspor luar

negeri yang mencapai 39,78 persen. Kontribusi tersebut terutama berasal dari ekspor jasa yang berkaitan dengan pengeluaran wisatawan mancanegara selama berada di Bali, sehingga secara langsung menggambarkan dinamika sektor pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri masih menjadi motor utama dalam menopang perekonomian Bali pada Triwulan II-2026.



Gambar 1.4 Distribusi PDRB Menurut Komponen Pengeluaran di Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2026



Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Y-on-Y Menurut Komponen Pengeluaran di Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2026

PDRB Bali dari sisi pengeluaran mencatatkan pertumbuhan positif pada seluruh komponen secara tahunan (y-on-y). Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 14,90 persen, yang didorong oleh meningkatnya realisasi

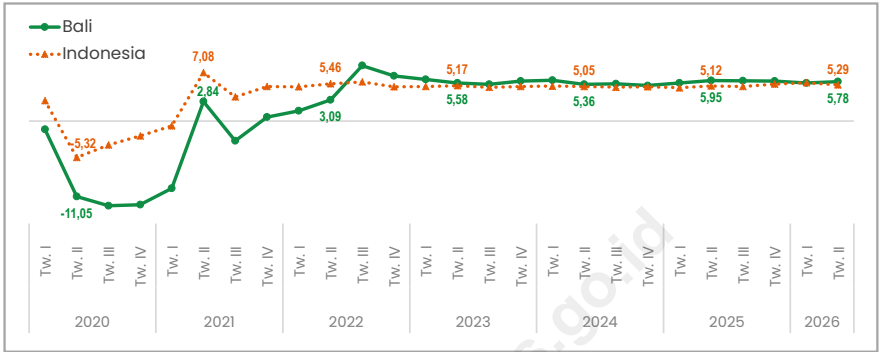
belanja pemerintah. Selanjutnya, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh sebesar 12,93 persen. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tercatat tumbuh sebesar 9,81 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 5,48 persen (Gambar 1.5).

Kinerja konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga menunjukkan aktivitas ekonomi domestik Bali masih cukup kuat. Di sisi lain, pertumbuhan aktivitas pariwisata turut menopang Komponen Ekspor Luar Negeri yang meningkat sebesar 2,23 persen. Dalam struktur ekonomi Bali, ekspor luar negeri lebih banyak ditopang oleh ekspor jasa yang mencerminkan pengeluaran wisatawan mancanegara selama berada di Bali. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang mengalami kontraksi sedalam 9,60 persen menunjukkan menurunnya ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar negeri.

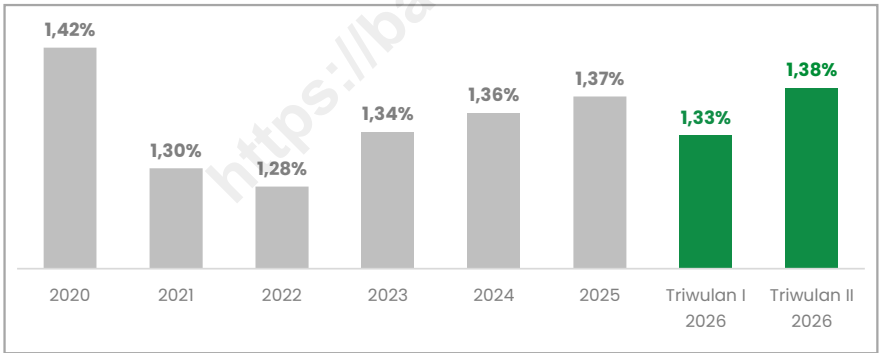
Jika dibandingkan dengan kinerja ekonomi nasional, Provinsi Bali secara konsisten mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi sejak Triwulan III-2022 (Gambar 1.6). Pada Triwulan III-2022, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat 2,37 persen poin lebih tinggi dibandingkan nasional sementara pada Triwulan III-2023 selisih tersebut jauh semakin sempit menjadi 0,43 persen poin. Namun demikian, pada Triwulan III-2024, kesenjangan pertumbuhan kembali melebar menjadi 0,48 persen poin. Selisih keduanya sedikit melebar pada Triwulan II-2026 di mana ekonomi Bali tumbuh 0,49 persen poin lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Hal ini semakin menegaskan bahwa daya saing dan ketahanan ekonomi daerah yang semakin menguat.

Kontribusi PDRB Bali atas dasar harga berlaku terhadap perekonomian nasional dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil pada

kisaran 1,3 persen (Gambar 1.7). Kontribusi tersebut tercatat sebesar 1,34 persen pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 1,36 persen pada tahun 2024. Sementara itu, pada Triwulan II-2026 kontribusi ekonomi Bali tercatat sebesar 1,38 persen, semakin menunjukkan peran Bali yang tetap kuat dalam struktur perekonomian nasional.



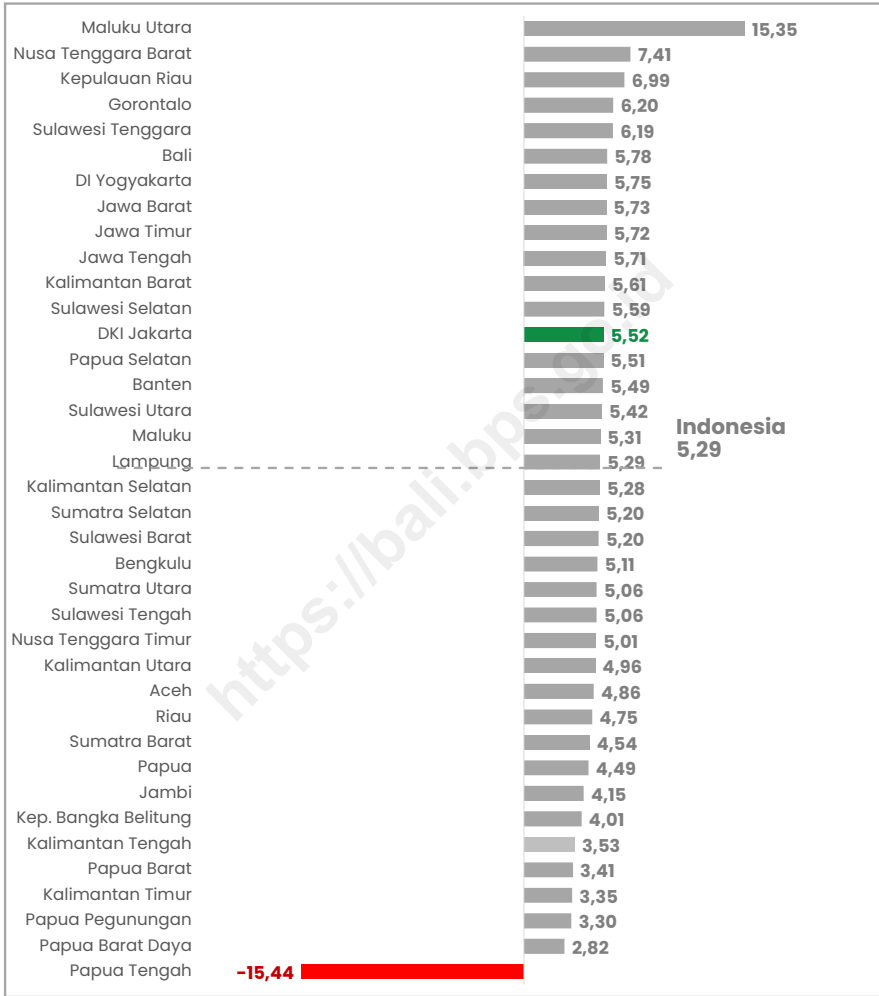
Gambar 1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Y-on-Y di Provinsi Bali dan Indonesia (persen), Triwulan I-2020 s.d. Triwulan II-2026



Gambar 1.7 Kontribusi PDRB Provinsi Bali terhadap Perekonomian Indonesia (persen), 2020 s.d. Triwulan II 2026

Berdasarkan Gambar 1.8, sebanyak 20 provinsi di Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan nasional pada Triwulan II-2026 secara *year-on-year*, satu di antaranya terkontraksi. Sementara itu, 18 provinsi tumbuh setara bahkan lebih tinggi dibandingkan

rata-rata nasional termasuk Provinsi Bali. Provinsi Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga dua digit. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional didorong oleh beberapa provinsi dengan akselerasi pertumbuhan yang sangat tinggi.



Gambar 1.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Y-on-Y Menurut Provinsi (persen), Triwulan II-2026

Provinsi Papua Tengah mengalami kontraksi ekonomi terdalam yaitu 15,44 persen akibat menurunnya produksi pada sektor pertambangan dan

penggalan yang mendominasi struktur perekonomian daerah tersebut. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Provinsi Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau yang terutama ditopang oleh tingginya aktivitas industri pengolahan berbasis hilirisasi nikel, smelter, serta industri *chipset* untuk kendaraan listrik. Sementara itu, Provinsi Bali mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang menempatkannya pada peringkat ketiga belas secara nasional.

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Bali pada Triwulan I-2026 menunjukkan momentum penguatan yang semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi secara *year-on-year* tercatat di atas 5 persen dan melampaui pertumbuhan nasional, sementara secara *quarter-to-quarter* Bali mampu mencatat pertumbuhan positif yang merupakan tertinggi kedua sejak masa pascapandemi. Penguatan kinerja tersebut turut meningkatkan kontribusi Bali terhadap perekonomian nasional dari 1,33 persen menjadi 1,38 persen. Capaian ini menegaskan semakin kuatnya peran Bali dalam perekonomian nasional sekaligus mencerminkan ketahanan dan fondasi ekonomi daerah yang semakin kokoh dalam menghadapi dinamika ekonomi ke depan.



Bab II

Inflasi

<https://id.idris6.go.id>

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Sebaliknya ketika terjadi penurunan harga barang dan jasa maka disebut dengan **Deflasi**.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari suatu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dengan dasar suatu periode tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu yang mengalami kenaikan merupakan inflasi, sedangkan yang mengalami penurunan merupakan deflasi.

Andil inflasi/deflasi menggambarkan besarnya sumbangan setiap komoditas yang mengalami fluktuasi harga terhadap inflasi/deflasi yang terjadi di suatu wilayah.

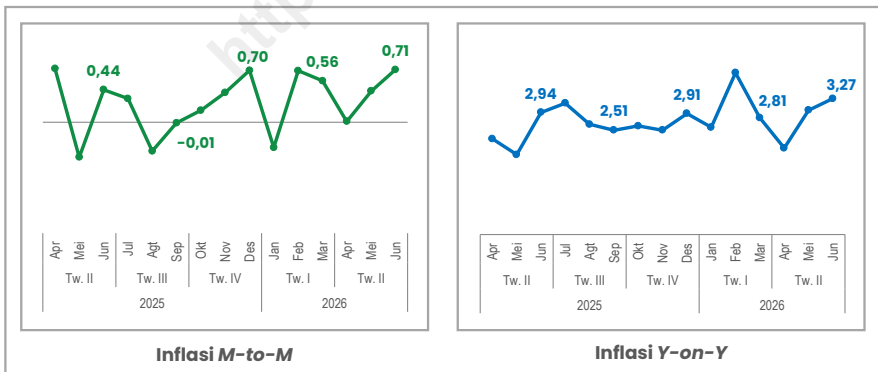
Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, maka mulai Januari 2024, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2022=100, yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 2018=100. Jika sebelumnya diseminasi IHK hanya dilakukan di level nasional dan kabupaten/kota, IHK dengan tahun dasar 2022=100 didiseminasikan di level provinsi.

IHK dihitung berdasarkan hasil Survei Harga Konsumen (SHK) yang dilaksanakan setiap bulan di 150 kabupaten/kota, yang terdiri dari 38 ibukota provinsi dan 112 kabupaten/kota. Untuk Provinsi Bali, SHK dilaksanakan di 4 wilayah yaitu Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singaraja, dan Kota Denpasar sehingga mulai Januari 2024 diseminasi tersedia untuk 4 wilayah tersebut dan agregasi Provinsi Bali.

Perkembangan inflasi dalam publikasi ini disajikan secara *month-to-month* dan *year-on-year*. Karena merupakan indikator yang dihitung secara bulanan, maka gambaran secara triwulanan akan disajikan dengan melihat kondisi tiga bulan di triwulan saat ini, utamanya dengan membandingkan capaian pada bulan terakhir di triwulan saat ini dengan capaian pada bulan terakhir di triwulan sebelum-sebelumnya.

Bab II Inflasi

Pengendalian harga menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung efektivitas kebijakan ekonomi dan keberlanjutan pertumbuhan. Perkembangan kondisi global, terutama yang memengaruhi pergerakan harga, dapat memicu tekanan inflasi yang berpotensi mengurangi daya beli riil rumah tangga dan meningkatkan ketidakpastian dunia usaha. Kondisi tersebut selanjutnya dapat menekan konsumsi dan investasi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kenaikan harga yang terlalu rendah dapat mencerminkan lemahnya permintaan agregat, yang berpotensi menekan ekspektasi keuntungan dan mengurangi dorongan perluasan kapasitas produksi. Oleh karena itu, menjaga laju kenaikan harga pada tingkat yang terkendali dan moderat menjadi kunci untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.



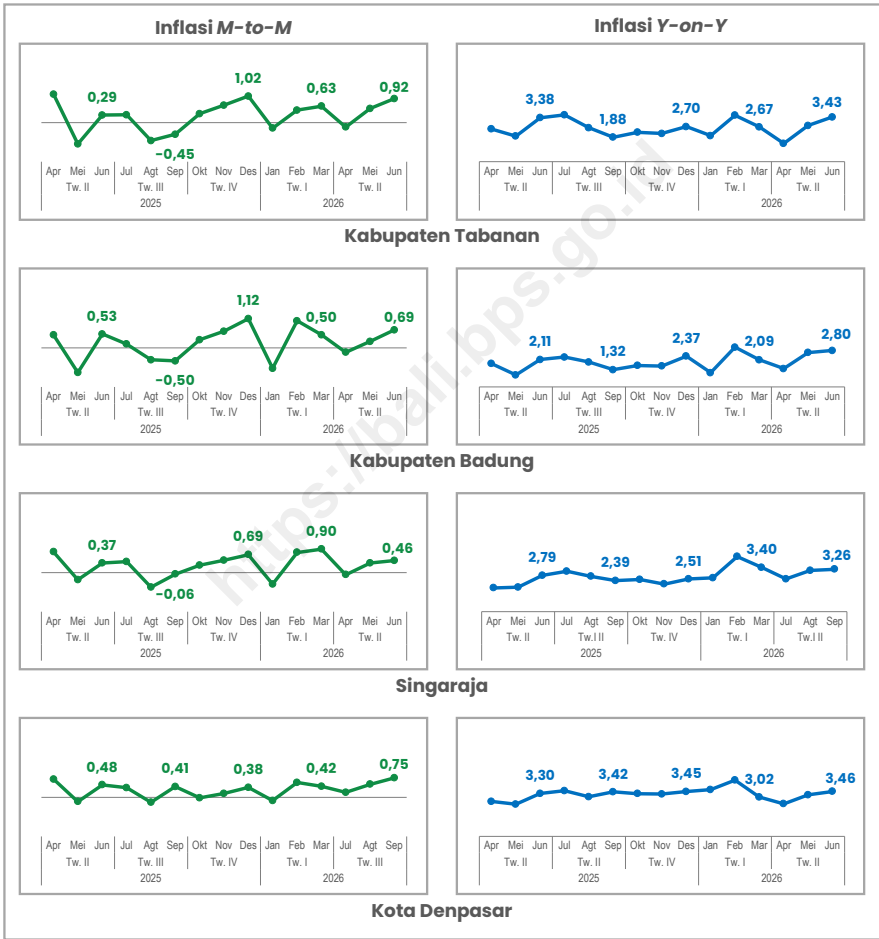
Gambar 2.1 Perkembangan Inflasi Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2025 s.d. Triwulan II-2026

Pada periode Triwulan II-2026, pergerakan harga di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan setiap bulannya. Pada April 2026, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,01 persen yang didorong oleh kenaikan harga jasa transportasi angkutan udara akibat kenaikan harga avtur. Selain itu, pada periode yang sama juga terjadi peningkatan harga komoditas seperti minyak goreng dan LPG Non Subsidi. Selanjutnya, menyambut perayaan hari raya Idul Adha dan meningkatnya curah hujan pada Mei 2026 diperkirakan menjadi pemicu kenaikan harga berbagai komoditas salah satunya yaitu cabai rawit yang menjadi salah satu pendorong terjadinya inflasi sebesar 0,42 persen pada bulan tersebut. Pada Juni 2026, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,71 persen yang utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan serta kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Berikutnya, capaian inflasi secara *year-on-year* pada Triwulan II-2026 menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan Triwulan I-2026 yang cenderung berfluktuasi (Gambar 2.1). Pada April 2026, gejolak harga berhasil ditekan hingga ke level 2,08 persen sebelum kemudian meningkat menjadi 2,99 persen pada Mei 2026. Kenaikan harga pada Mei 2026 diakibatkan oleh peningkatan harga sejumlah komoditas pangan terutama cabai rawit, beras, dan daging ayam. Menutup periode Triwulan II-2026 pada Juni 2026, inflasi tahun ke tahun tercatat semakin meningkat hingga 3,27 persen. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas transportasi akibat melonjaknya harga bensin hingga 6,12 persen dibandingkan Juni 2025.

Melihat lebih dalam, capaian pada keempat wilayah penghitungan inflasi di Provinsi Bali disajikan pada Gambar 2.2. Memasuki Triwulan II 2026, dua wilayah mengalami deflasi secara *month-to-month* pada April

2026. Meskipun demikian, secara umum capaian inflasi di empat wilayah tersebut masih terjaga dalam kisaran sasaran inflasi $2,5 \pm 1$ persen. Menutup periode yang sama, semua wilayah mengalami inflasi pada Juni 2026 dengan capaian tertinggi di Kabupaten Tabanan. Sementara itu, Kabupaten Badung dan Singaraja justru tercatat mengalami inflasi yang lebih rendah dari level Provinsi Bali.



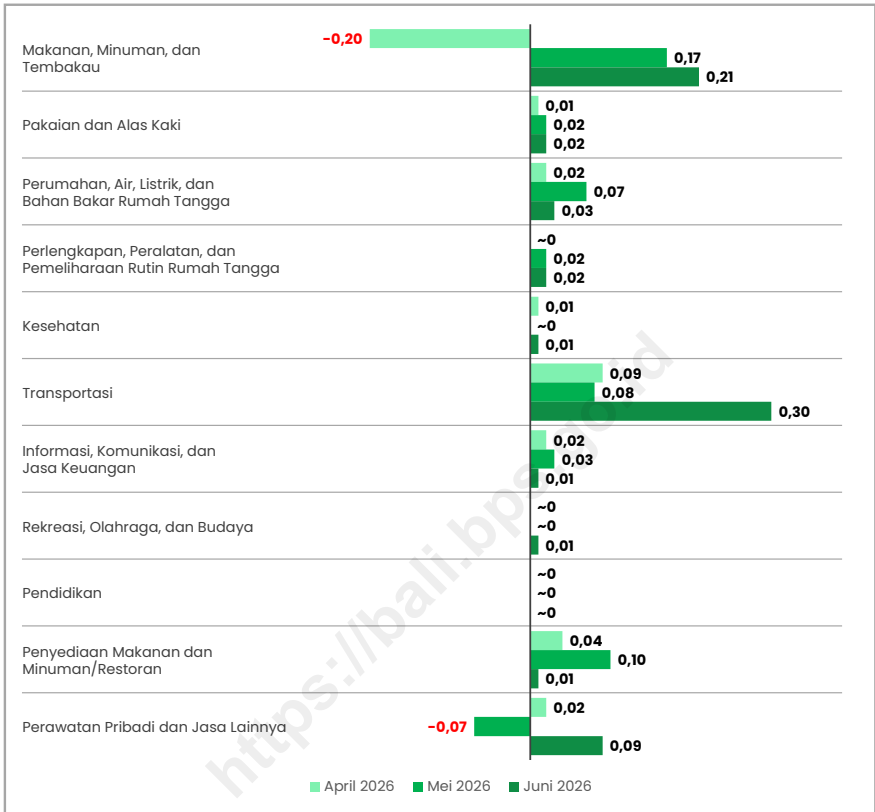
Gambar 2.2 Perkembangan Inflasi Menurut Cakupan Wilayah IHK Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2025 s.d. Triwulan II-2026

Kenaikan harga secara *year-on-year* terjadi di seluruh wilayah penghitungan inflasi di Provinsi Bali, dengan pola pergerakan yang identik. Pada Triwulan II-2026, perkembangan inflasi menunjukkan pola kenaikan tekanan harga pada akhir periode di seluruh wilayah penghitungan, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Peningkatan inflasi *year-on-year* paling signifikan terjadi di Kabupaten Tabanan, dari 2,38 persen pada Juni 2025 menjadi 3,43 persen pada Juni 2026 atau meningkat 1,05 persen poin. Sementara itu, inflasi di Denpasar relatif lebih stabil dengan peningkatan sebesar 0,16 persen poin, dari 3,30 persen menjadi 3,46 persen. Pola tersebut mengindikasikan bahwa tekanan kenaikan harga pada Triwulan-II 2026 terjadi secara luas antardaerah, namun dengan karakteristik yang berbeda, yang mencerminkan adanya variasi kondisi permintaan, pasokan, serta dinamika harga komoditas di masing-masing wilayah.

Berdasarkan andil inflasi secara *month-to-month* yang disajikan pada Gambar 2.3, pergerakan harga antarkelompok pengeluaran menunjukkan dinamika yang beragam, dengan kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi salah satu kelompok yang memberikan tekanan terhadap inflasi selama periode April–Juni 2026. Tekanan harga juga terlihat pada kelompok Transportasi serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran, yang mencerminkan pengaruh mobilitas dan aktivitas konsumsi masyarakat terhadap perkembangan harga. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki, Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta kelompok lainnya bergerak relatif moderat.

Lebih lanjut, gambaran komoditas yang memberikan andil inflasi secara *month-to-month* disajikan pada Gambar 2.4. Pada Triwulan II-2026, inflasi Bali terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan, sementara angkutan udara menjadi salah satu pendorong utama pada April 2026.

Pada Juni 2026, kenaikan harga bensin paling besar mempengaruhi inflasi, disusul oleh bawang merah, bawang putih, dan canang sari.



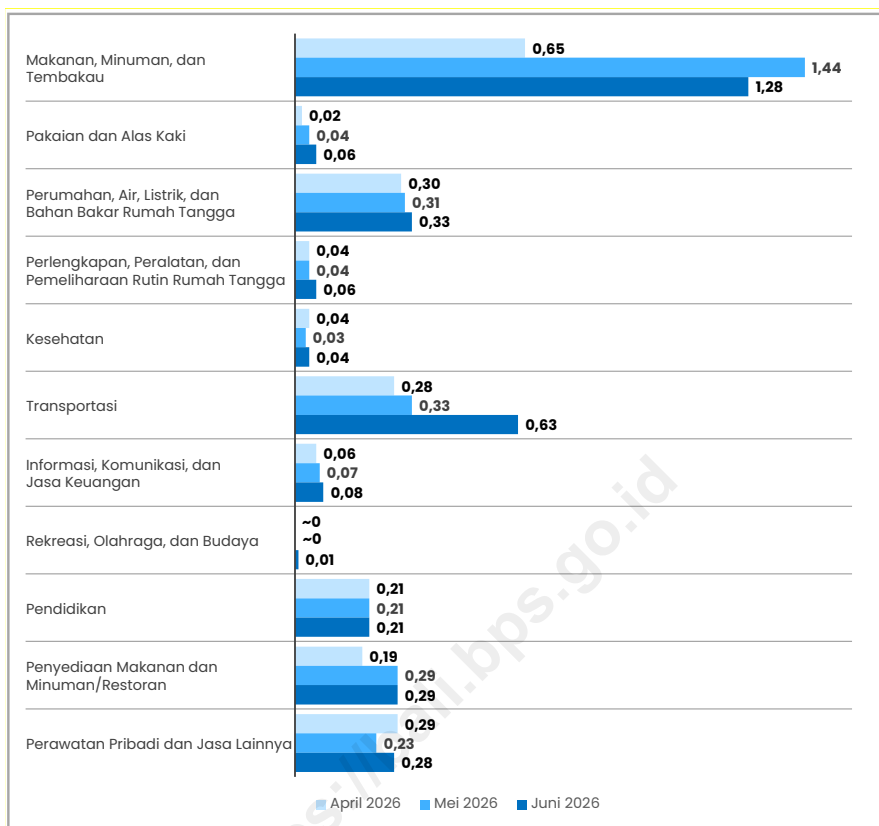
Gambar 2.3 Andil Inflasi M-to-M Provinsi Bali Menurut Kelompok Pengeluaran (persen), Triwulan II-2026

April 2026 (Inflasi)		Mei 2026 (Inflasi)		Juni 2026 (Inflasi)	
Angkutan udara	0,08	Beras	0,04	Bensin	0,31
Beras	0,06	Cabai rawit	0,04	Bawang merah	0,10
Minyak goreng	0,05	Bahan bakar ruta	0,04	Bawang putih	0,07
Canang sari	0,05	Minyak goreng	0,03	Canang sari	0,07
Nasi dengan lauk	0,04	Cabai merah	0,03	Wortel	0,03

Gambar 2.4 Lima Komoditas Penyumbang Utama Inflasi M-to-M Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2026

Secara *year-on-year*, perkembangan harga pada Triwulan II 2026 menunjukkan tekanan inflasi yang terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, dengan kenaikan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Kelompok Transportasi juga menjadi salah satu sumber tekanan harga yang cukup kuat, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.5, dengan kenaikan yang cenderung menguat hingga Juni 2026. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang meningkatkan biaya mobilitas masyarakat sekaligus berpotensi mendorong kenaikan biaya distribusi barang dan jasa. Efek lanjutan tersebut dapat memperkuat tekanan harga pada berbagai komoditas, terutama yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya transportasi. Sementara itu, Kelompok Perumahan, Rekreasi, Pendidikan, serta Penyediaan Makanan dan Minuman menunjukkan kenaikan yang relatif lebih moderat, sehingga tekanan inflasi pada Triwulan II 2026 masih lebih terkonsentrasi pada kelompok pangan dan transportasi.

Berdasarkan lima komoditas dengan andil inflasi terbesar secara *year-on-year* pada Triwulan II 2026, terlihat adanya pergeseran sumber tekanan harga antarbulan. Pada April 2026, inflasi terutama didorong oleh daging ayam ras, emas perhiasan, beras, sewa rumah serta angkutan udara. Memasuki Mei 2026, tekanan lebih banyak berasal dari komoditas pangan utamanya abai rawit dan beras. Sementara itu, tekanan yang lebih kuat dari komoditas energi dan pangan terlihat pada Juni 2026, dengan bensin menjadi penyumbang terbesar (0,32 persen), diikuti bawang merah dan cabai rawit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi Triwulan II 2026 paling banyak dipengaruhi oleh dinamika harga pangan dan energi, dengan kenaikan harga BBM turut memperkuat tekanan inflasi pada akhir triwulan.



Gambar 2.5 Andil Inflasi Y-on-Y Provinsi Bali Menurut Kelompok Pengeluaran (persen), Triwulan II-2026

April 2026 (Inflasi)		Mei 2026 (Inflasi)		Juni 2026 (Inflasi)	
Daging ayam ras	0,24	Cabai rawit	0,33	Bensin	0,32
Emas perhiasan	0,17	Beras	0,16	Bawang merah	0,18
Beras	0,13	Daging ayam ras	0,15	Cabai rawit	0,17
Sewa rumah	0,10	Emas perhiasan	0,15	Beras	0,15
Angkutan udara	0,10	Pemeliharaan/servis	0,11	Emas perhiasan	0,15

Gambar 2.6 Lima Komoditas Penyumbang Utama Inflasi Y-on-Y Provinsi Bali (persen), Triwulan II-2026

Sebagai penutup bab ini, dinamika inflasi Provinsi Bali pada Triwulan II-2026 menunjukkan bahwa tekanan harga terutama dipengaruhi oleh

kenaikan harga pangan dan transportasi. Komoditas pangan seperti beras, cabai, bawang merah, dan bawang putih masih menjadi penyumbang inflasi, sementara pada Juni 2026 kenaikan harga bensin menjadi pendorong terbesar seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Di sisi lain, peningkatan biaya transportasi juga berpotensi memberikan tekanan lanjutan melalui kenaikan biaya distribusi barang dan jasa. Perbedaan perkembangan inflasi antarwilayah menunjukkan bahwa tekanan harga masih dipengaruhi oleh karakteristik pasokan, permintaan, dan struktur konsumsi masing-masing daerah.

Secara keseluruhan, tekanan inflasi pada Triwulan II-2026 menunjukkan kombinasi faktor pangan, energi, dan mobilitas masyarakat, dengan penguatan tekanan harga yang terlihat pada akhir triwulan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya menjaga kelancaran pasokan dan distribusi pangan, mengantisipasi dampak perubahan harga energi terhadap biaya distribusi, serta memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan volatilitas harga. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah melalui perumusan kebijakan yang lebih tepat dan akurat.



Bab III

Nilai Tukar Petani & Nilai Tukar Usaha Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP) digunakan sebagai indikator dalam menggambarkan daya tukar (*term of trade*) dari nilai produk yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dikonsumsi dan biaya produksi yang dibayar petani.

NTP dihitung dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) terhadap Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan dikalikan 100.

- $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani lebih kecil dari pengeluarannya.

Dalam penyajiannya, hasil penghitungan NTP dapat dikelompokkan menjadi 5 sub sektor yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan.

Pengumpulan data harga untuk penghitungan NTP dilakukan melalui Survei Harga Produsen Perdesaan dan Survei Harga Konsumen Perdesaan, dengan cakupan 34 provinsi di Indonesia, dan di Provinsi Bali cakupannya adalah 8 kabupaten (selain Kota Denpasar).

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) merupakan indikator yang juga menggambarkan daya tukar, namun perbedaannya dengan NTP adalah NTUP tidak mengikutsertakan biaya konsumsi barang/jasa yang dibayar oleh petani, hanya mengikutsertakan biaya produksi yang berkaitan dengan usaha pertaniannya. Sehingga, Ib pada NTP hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).

NTP dan NTUP merupakan indikator yang dihitung secara bulanan. Sehingga gambaran secara triwulanan akan disajikan dengan melihat kondisi tiga bulan di triwulan saat ini, utamanya dengan membandingkan capaian pada bulan terakhir di triwulan saat ini dengan capaian pada bulan terakhir di triwulan sebelum-sebelumnya.

Bab III

Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP)

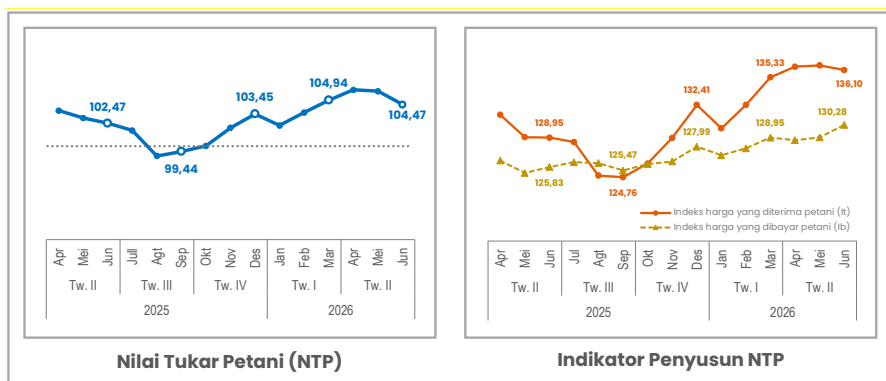
Pada Triwulan II-2026, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Bali, dengan kontribusi 12,85 persen terhadap PDRB serta menempati posisi kedua setelah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai 21,91 persen. Kesenjangan kontribusi yang cukup lebar di antara keduanya menegaskan bahwa transformasi struktur ekonomi Bali menuju dominasi industri jasa dan pariwisata terus berlanjut. Ditinjau dari sisi ketenagakerjaan, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Mei 2026 menunjukkan bahwa 18,17 persen penduduk bekerja masih terserap di sektor pertanian. Artinya, hampir satu dari lima pekerja di Bali yang menggantungkan mata pencahariannya pada aktivitas budidaya tanaman, peternakan, dan perikanan. Di tengah struktur tersebut, dinamika Nilai Tukar Petani (NTP) pada awal tahun 2026 menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah sektor pertanian belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan daya beli petani, sehingga kerentanan ekonomi rumah tangga petani tetap menjadi isu strategis dalam perekonomian Bali yang kian bertumpu pada aktivitas pariwisata dan jasa.

Dalam struktur ekonomi Bali yang semakin bertumpu pada jasa dan pariwisata, NTP menjadi indikator penting untuk merumuskan kebijakan pertanian yang lebih tepat sasaran. NTP tidak hanya menggambarkan posisi tawar petani terhadap fluktuasi harga komoditas dan input produksi, tetapi juga menunjukkan apakah pendapatan usaha tani

masih mampu menjaga daya beli rumah tangga petani. Bagi perencanaan kebijakan di Bali, pergerakan NTP dapat digunakan sebagai alarm dini untuk mengevaluasi efektivitas subsidi input, skema perlindungan harga di tingkat petani, serta program hilirisasi dan diversifikasi usaha tani. Dengan menjadikan NTP sebagai salah satu rujukan utama, intervensi pemerintah dapat lebih terarah untuk mengurangi kerentanan petani, menjaga keberlanjutan produksi pangan, dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi Bali tidak mengakibatkan sektor pertanian jauh tertinggal.

Pada Triwulan II-2026, NTP Provinsi Bali menunjukkan perkembangan positif dengan indeks tetap berada di atas 100, yaitu 104,47 pada Juni 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga yang diterima petani masih lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga yang harus dibayar, sehingga daya tukar petani relatif terjaga. Secara lebih spesifik, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan hasil produksi pertanian masih mampu mengimbangi kenaikan biaya konsumsi dan produksi, sehingga posisi ekonomi petani secara agregat membaik. Perkembangan tersebut juga mencerminkan semakin kuatnya kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi (Gambar 3.1).

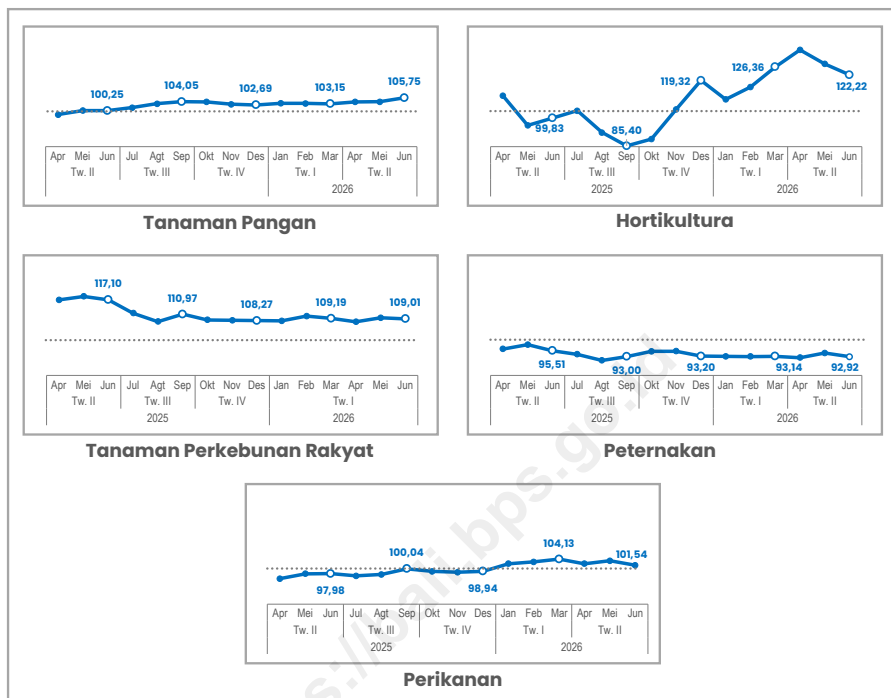
Secara umum, perbaikan NTP pada Triwulan II-2026 didukung oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Pada Juni 2026, It tercatat sebesar 136,10, sedangkan Ib sebesar 130,28, menunjukkan bahwa peningkatan harga hasil produksi pertanian masih mampu mengimbangi kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya beli petani secara agregat tetap terjaga, meskipun perkembangan harga input dan kebutuhan rumah tangga tetap perlu menjadi perhatian.



Gambar 3.1 Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Indikator Penyusunnya di Provinsi Bali, Triwulan II-2025 s.d. Triwulan II-2026

Pada Triwulan II-2026, perkembangan NTP menurut subsektor menunjukkan bahwa penguatan daya tukar petani belum berlangsung secara merata. Hortikultura tetap menjadi subsektor dengan daya tukar paling kuat, meskipun NTP-nya menurun dari 135,17 pada April 2026 menjadi 122,22 pada Juni 2026. Sementara itu, NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat dan Tanaman Pangan relatif stabil, dengan capaian masing-masing sebesar 109,01 dan 105,75 pada Juni 2026. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa harga komoditas pada ketiga subsektor tersebut masih memberikan ruang yang cukup bagi petani untuk mengimbangi kenaikan biaya konsumsi dan produksi. Namun demikian, penurunan NTP hortikultura yang cukup dalam menunjukkan bahwa tekanan terhadap daya tukar petani mulai meningkat, terutama ketika pertumbuhan harga yang diterima petani tidak mampu dipertahankan pada level sebelumnya. Di sisi lain, posisi NTP Tanaman Perkebunan Rakyat dan Tanaman Pangan yang tetap berada di atas 100 menunjukkan bahwa penerimaan petani masih relatif lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya untuk kebutuhan konsumsi dan produksi. Perbedaan perkembangan antarsubsektor tersebut mencerminkan adanya variasi kondisi harga komoditas dan struktur biaya yang dihadapi petani,

sehingga peningkatan kesejahteraan petani perlu dilihat secara lebih spesifik menurut karakteristik masing-masing subsektor.



Gambar 3.2 Perkembangan Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor di Provinsi Bali, Triwulan II-2025 s.d. Triwulan II-2026

Di sisi lain, NTP subsektor Perikanan mencapai 101,54 pada Juni 2026, yang menunjukkan pemulihan dan kembali berada di atas paritas, meskipun ruang penguatannya masih terbatas. Berbeda dengan subsektor lainnya, subsektor Peternakan masih mencatat NTP sebesar 92,92 atau berada di bawah 100, yang mengindikasikan bahwa kenaikan harga hasil produksi belum mampu mengimbangi tekanan biaya yang dihadapi peternak. Kesenjangan antarsubsektor ini menunjukkan bahwa perbaikan NTP Bali pada Triwulan II-2026 lebih banyak ditopang oleh subsektor dengan penguatan harga output yang relatif lebih tinggi, sementara subsektor

peternakan masih menjadi titik lemah dalam pemulihan daya tukar sektor pertanian sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.2. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan daya tukar belum terjadi secara merata di seluruh subsektor pertanian di Bali. Tekanan biaya produksi masih menjadi tantangan utama bagi subsektor peternakan dalam memperbaiki margin usaha dan pendapatan peternak. Sementara itu, penguatan pada subsektor perikanan perlu terus dijaga agar perbaikan NTP dapat berlangsung lebih berkelanjutan.

Pada Tanaman Pangan (NTPP), Hortikultura (NTPH), dan Perkebunan Rakyat (NTPR), daya tukar petani pada Triwulan II-2026 secara umum masih berada dalam kondisi relatif baik. NTPP mencapai 105,75 dan NTPR 109,01 pada Juni 2026, menunjukkan harga yang diterima petani masih mampu mengimbangi biaya konsumsi dan produksi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kedua subsektor tersebut masih memiliki ruang yang cukup untuk mempertahankan daya beli dan keberlanjutan usaha petani tanaman pangan.

Sementara itu, NTPH meskipun sangat fluktuatif, tetap berada pada level tinggi yaitu 122,22, mengindikasikan prospek pendapatan petani hortikultura masih kuat, meski lebih rentan terhadap perubahan harga dan pasokan komoditas. Berbeda dengan subsektor lainnya, Peternakan (NTP) masih menghadapi tekanan daya tukar, dengan indeks sebesar 92,92 pada Juni 2026. Posisi di bawah 100 menunjukkan bahwa kenaikan harga yang diterima peternak belum mampu mengimbangi kenaikan biaya yang harus dibayar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan biaya produksi masih menjadi persoalan utama, sehingga peningkatan harga output belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi perbaikan kesejahteraan peternak.

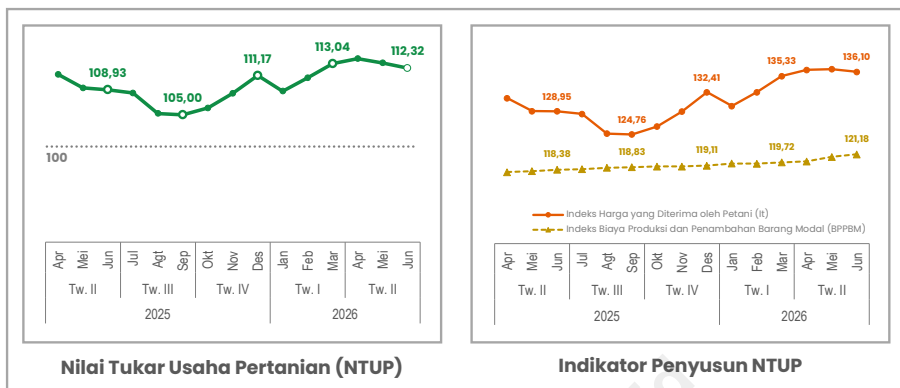
Sementara itu, subsektor Perikanan (NTNP) menunjukkan pemulihan pada awal tahun 2026, tetapi momentumnya mulai melambat pada Triwulan II dengan indeks turun menjadi 101,54 pada Juni 2026. Secara keseluruhan, empat dari lima subsektor masih memiliki daya tukar di atas 100, menandakan kondisi relatif positif bagi petani Bali. Namun, tingginya volatilitas hortikultura dan tekanan yang persisten pada peternakan menunjukkan bahwa kinerja daya tukar belum merata, sehingga penguatan kesejahteraan petani perlu mempertimbangkan karakteristik biaya dan dinamika harga masing-masing subsektor.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)

Nilai tukar petani membandingkan nilai tukar produk pertanian dengan nilai pengeluaran petani termasuk konsumsi rumah tangga, sehingga sering kali keuntungan usaha tani tercampur dengan dinamika daya beli keluarga petani. Bila perhatian diarahkan khusus pada komponen biaya input produksi dan barang modal (BPPBM), ukuran yang lebih tepat adalah Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Indikator ini merefleksikan profitabilitas riil usaha tani karena langsung menangkap efisiensi penggunaan faktor produksi serta menunjukkan apakah petani berada pada posisi surplus atau defisit dalam periode tertentu.

Secara konseptual, NTUP yang meningkat menunjukkan bahwa pertumbuhan harga yang diterima petani lebih cepat dibandingkan kenaikan biaya produksi, sehingga margin usaha pertanian cenderung membaik. Sebaliknya, penurunan NTUP mengindikasikan meningkatnya tekanan biaya input terhadap pendapatan usaha, meskipun NTP secara keseluruhan masih dapat menunjukkan kondisi yang relatif baik. Oleh karena itu, analisis NTP dan NTUP secara bersamaan memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai kesejahteraan rumah tangga petani sekaligus keberlanjutan dan efisiensi kegiatan usaha pertanian.

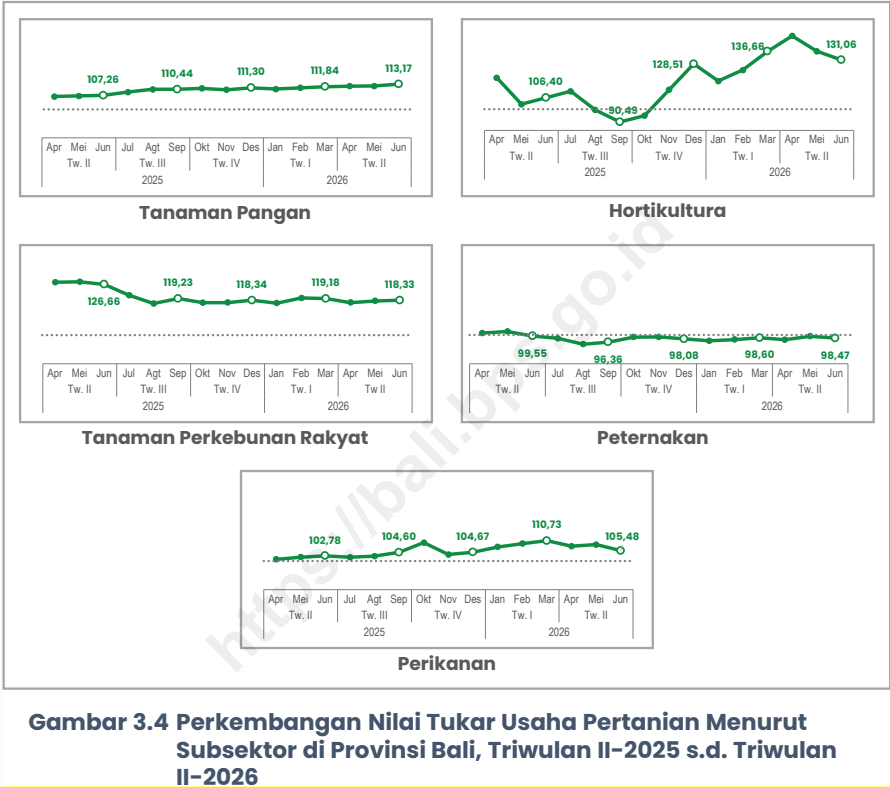


Gambar 3.3 Perkembangan Nilai Tukar Usaha Pertanian dan Indikator Penyusunnya di Provinsi Bali, Triwulan II-2025 s.d. Triwulan II-2026

Memasuki Triwulan II-2026, NTUP masih berada pada level yang tinggi, dengan indeks meningkat pada April 2026, lalu menurun pada Mei dan kembali turun pada Juni 2026 hingga sebesar 112,32. Meskipun mengalami penurunan pada dua bulan terakhir, NTUP tetap berada jauh di atas level 100, menunjukkan bahwa kemampuan usaha pertanian dalam menghasilkan pendapatan masih relatif kuat dibandingkan beban biaya produksi dan penambahan barang modal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa margin usaha pertanian Bali pada Triwulan II-2026 masih terjaga, meskipun penguatan yang terjadi pada awal tahun mulai tertahan menjelang akhir triwulan. Penurunan NTUP pada akhir triwulan perlu menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan mulai meningkatnya tekanan biaya produksi atau melambatnya pertumbuhan harga yang diterima petani.

Jika dikaji lebih mendalam menurut subsektor, pergerakan NTUP Bali pada Triwulan II-2026 menunjukkan bahwa penguatan usaha pertanian

masih ditopang oleh sebagian besar subsektor, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Setelah secara umum menguat pada awal 2026, perkembangan pada Triwulan II memperlihatkan beberapa subsektor mulai mengalami penurunan, sementara subsektor lainnya masih mampu mempertahankan margin usaha pada level relatif tinggi.



Pada Triwulan II-2026, NTUP subsektor Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan Rakyat masih relatif stabil dengan indeks masing-masing mencapai 113,17 dan 118,33 pada Juni 2026, menunjukkan margin usaha yang tetap terjaga. Sementara itu, Hortikultura masih menjadi subsektor dengan NTUP tertinggi meskipun mengalami penurunan dari 136,66 pada Maret 2026 menjadi 131,06 pada Juni 2026, yang

mengindikasikan mulai tertahannya penguatan margin usaha setelah kenaikan tajam pada awal 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kinerja usaha pertanian masih cukup resilien, meskipun mulai menghadapi tekanan yang berbeda antarsubsektor. Di sisi lain, Peternakan menunjukkan margin usaha yang relatif lebih tipis karena NTUP bergerak di sekitar level 100, sehingga lebih rentan terhadap perubahan harga output maupun biaya input. Perikanan juga mengalami penurunan dari 110,73 pada Maret 2026 menjadi 105,48 pada Juni 2026, meskipun masih berada di atas 100 dan menunjukkan surplus usaha tetap terjaga. Secara umum, kinerja NTUP masih positif, tetapi penurunan pada hortikultura dan perikanan perlu dicermati karena menunjukkan mulai tertahannya penguatan margin usaha pada Triwulan II-2026.

Secara keseluruhan, perkembangan NTUP pada Triwulan II-2026 menunjukkan bahwa usaha pertanian Bali masih berada dalam kondisi yang relatif kuat, dengan sebagian besar subsektor mampu mempertahankan indeks di atas 100 dan menghasilkan margin usaha yang positif. Namun, capaian tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena margin yang positif belum serta-merta menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani, terutama ketika tekanan biaya produksi dan perbedaan kinerja antarsubsektor masih cukup besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan usaha pertanian belum sepenuhnya merata antarsubsektor. Oleh karena itu, penguatan lapangan usaha pertanian ke depan perlu diarahkan pada pengendalian dan efisiensi biaya produksi, stabilisasi harga input dan output, penguatan rantai pasok, serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah melalui hilirisasi dan diversifikasi usaha. Dalam perspektif kebijakan yang pro-petani, intervensi perlu lebih diarahkan pada upaya menjaga margin petani, bukan semata-mata meningkatkan produksi. Intervensi bisa dilakukan melalui akses input

yang lebih terjangkau, perlindungan harga pada tingkat produsen, penguatan kelembagaan petani, serta akses pembiayaan dan teknologi yang lebih mudah. Pada saat yang sama, keterhubungan sektor pertanian dengan pariwisata sebagai pasar strategis perlu terus diperkuat agar peningkatan permintaan tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan margin usaha yang lebih berkelanjutan bagi petani dan pelaku usaha pertanian di Bali. Dengan demikian, kebijakan pertanian perlu memastikan bahwa peningkatan nilai tambah di sepanjang rantai pasok dapat ditransmisikan secara lebih adil hingga ke tingkat petani sebagai produsen utama.

<https://bali.bps.go.id>



Bab IV

Pariwisata

<https://id.scribd.com/doc/111111111>

Wisatawan mancanegara adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi.

Data kunjungan wisatawan mancanegara diperoleh dari Ditjen Imigrasi berupa laporan kedatangan harian dari luar negeri, yang meliputi seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia. Untuk TPI di Provinsi Bali dibagi menjadi 2 lokasi yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah persentase banyaknya malam kamar yang dihuni/terpakai terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia. Dalam penyajiannya, data TPK dikelompokkan menjadi TPK hotel berbintang dan TPK hotel nonbintang. Untuk TPK hotel berbintang bisa dirinci menurut kelas klasifikasinya yaitu bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.

Rata-rata lama tamu menginap (RLM) adalah hasil bagi antara banyaknya malam tempat tidur yang terpakai (malam tamu) dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya dalam besaran hari.

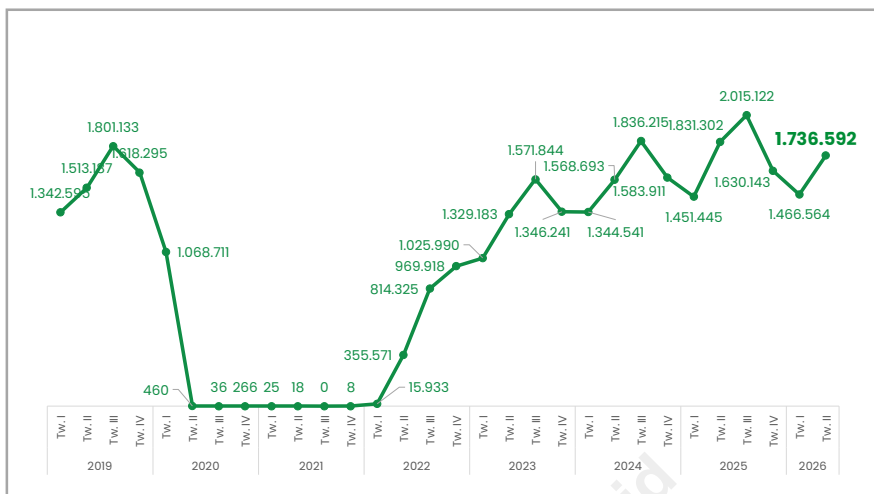
Data TPK dan RLM diperoleh dari hasil Survei Hotel yang dilakukan setiap bulan terhadap seluruh hotel berklasifikasi bintang dan sebagian (sampel) hotel non bintang di seluruh Indonesia.

Bab IV

Pariwisata

Ekonomi Bali kembali mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Provinsi Bali selama ini dikenal sebagai daerah dengan laju pertumbuhan di atas rata-rata nasional dengan corak kinerja ekonomi Bali yang bertumpu pada aktivitas pariwisata. Pandemi Covid-19 sempat memberikan pukulan signifikan terhadap sektor ini, yang terlihat dari penurunan tajam kunjungan wisatawan mancanegara sejak tahun 2020. Namun, pemulihan berjalan konsisten, dan pada tahun 2025 total kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 6,93 juta kunjungan, melampaui angka tahun 2019 yang sebesar 6,28 juta, menandakan bahwa aktivitas pariwisata tidak hanya kembali pulih, tetapi juga masuk ke fase baru dengan tantangan yang berbeda.

Tren positif aktivitas pariwisata Bali tetap berlanjut memasuki Triwulan II-2026, meskipun menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Sebagaimana Gambar 4.1, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali pada Triwulan II-2026 tercatat sebesar 1,74 juta kunjungan, meningkat sekitar 270 ribu kunjungan atau tumbuh 18,41 persen dibandingkan Triwulan I-2026. Namun, capaian tersebut justru menurun sekitar 99,6 ribu kunjungan atau 5,43 persen dibandingkan Triwulan II-2025, yang menunjukkan bahwa momentum pemulihan mulai mengalami perlambatan sehingga diperlukan strategi yang lebih terarah tidak hanya pemulihan kuantitas wisatawan yang berkunjung ke Bali.

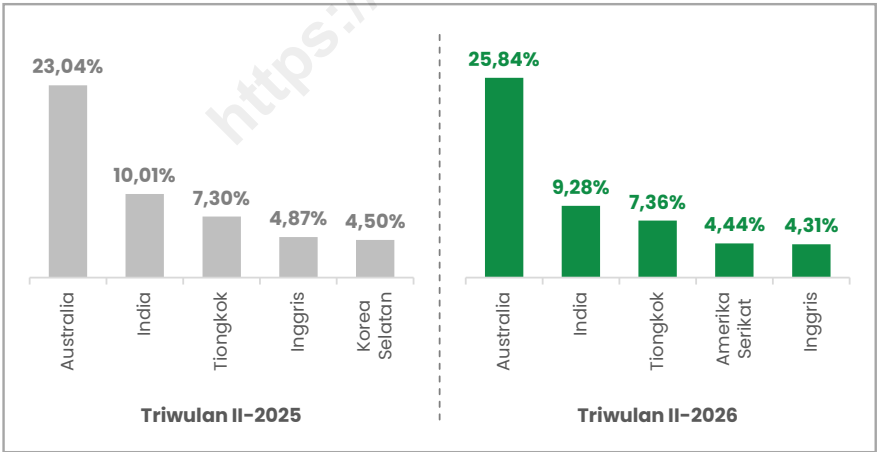


Gambar 4.1 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali, Triwulan I-2019 s.d. Triwulan II-2026

Jika melihat pola triwulanan, capaian 1,74 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada Triwulan II-2026 meningkat sebesar 18,40 persen dibandingkan Triwulan I-2026 yang tercatat 1,47 juta kunjungan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan Triwulan II-2025 yang sebesar 1,83 juta maupun Triwulan III-2025 yang mencapai 2,02 juta kunjungan. Dinamika pada Triwulan II setiap tahunnya sejalan dengan pola musiman pariwisata internasional menjelang periode liburan pertengahan tahun, sementara Triwulan III setiap tahunnya secara historis cenderung menjadi periode puncak kunjungan karena bertepatan dengan libur musim panas dan sekolah di sejumlah negara asal wisatawan. Meski demikian, capaian yang belum menyamai periode yang sama tahun sebelumnya menunjukkan bahwa permintaan wisatawan mancanegara masih menghadapi dinamika, sekaligus memperlihatkan kuatnya pengaruh faktor musiman terhadap aktivitas pariwisata Bali. Kondisi ini menjadi tantangan untuk menjaga tingkat aktivitas usaha pariwisata sepanjang

tahun, namun peningkatan kunjungan memberikan sinyal bahwa momentum pariwisata mulai menguat memasuki pertengahan tahun dan berpotensi kembali meningkat pada periode puncak di Triwulan III.

Melihat lebih detail berdasarkan negara asal wisatawan, terdapat perubahan komposisi pasar pada Triwulan II-2026 (Gambar 4.2). Australia tetap menjadi pasar terbesar dengan kontribusi sekitar 25,84 persen, meningkat dibandingkan Triwulan II-2025 yang sebesar 23,04 persen. India berada di posisi kedua dengan kontribusi 9,28 persen, menurun dari 10,01 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, kontribusi wisatawan asal Tiongkok relatif stabil, yaitu 7,36 persen dibandingkan 7,30 persen pada Triwulan II-2025. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing menyumbang 4,44 persen dan 4,31 persen. Kelima pasar utama tersebut, menunjukkan bahwa separuh kunjungan wisatawan mancanegara masih bertumpu pada pasar yang relatif terbatas sehingga diversifikasi pasar diperlukan untuk memperkuat ketahanan pariwisata Bali.

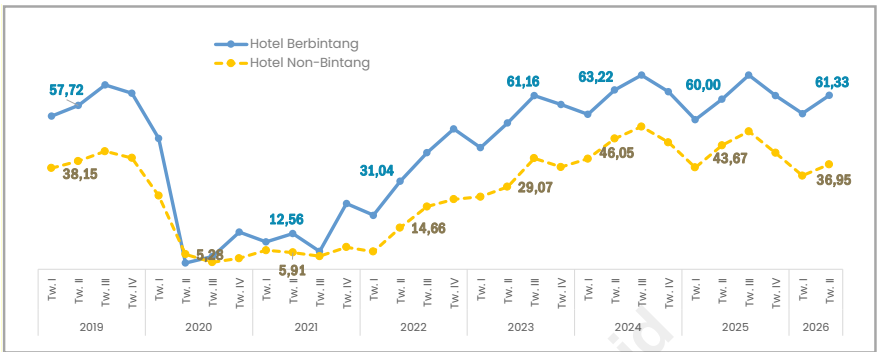


Gambar 4.2 Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Lima Negara/Wilayah/Entitas Tertentu Terbesar di Provinsi Bali, Triwulan II-2025 dan Triwulan II-2026

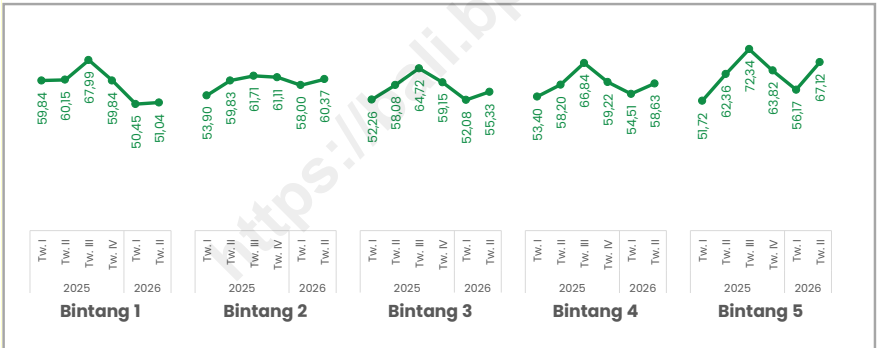
Kinerja pariwisata dicerminkan melalui salah satu Indikator yaitu Tingkat Penghunian Kamar (TPK). TPK hotel berbintang pada Triwulan II-2026 tercatat sebesar 61,33 persen, meningkat 1,33 persen poin dibandingkan Triwulan II-2025 yang sebesar 60,00 persen (Gambar 4.3). Sebaliknya, hotel nonbintang mengalami tekanan yang cukup signifikan. TPK hotel nonbintang turun 6,72 persen poin menjadi 36,95 persen. Perbedaan arah ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas pariwisata belum sepenuhnya tersebar merata pada seluruh segmen akomodasi, dengan hotel berbintang relatif lebih mampu mempertahankan tingkat hunian, sementara hotel nonbintang menghadapi tekanan permintaan yang lebih besar.

Jika ditelusuri menurut klasifikasi hotel berbintang, perkembangan TPK pada Triwulan II-2026 menunjukkan pola yang tidak seragam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Gambar 4.4). Hotel bintang 5 menjadi penggerak utama peningkatan TPK, dengan kenaikan sebesar 4,32 persen poin dari 62,36 persen pada Triwulan II-2025 menjadi 66,68 persen pada Triwulan II-2026. Penguatan juga terjadi pada hotel bintang 4 yang meningkat 0,31 persen poin menjadi 58,51 persen, sementara hotel bintang 2 relatif stabil dengan kenaikan tipis 0,06 persen poin menjadi 59,89 persen. Sebaliknya, hotel bintang 1 mengalami penurunan paling dalam sebesar 7,73 persen poin menjadi 52,42 persen, disusul hotel bintang 3 yang turun 2,79 persen poin menjadi 55,29 persen. Kesenjangan kinerja antarklasifikasi tersebut mengindikasikan bahwa pemulihan permintaan akomodasi belum berlangsung secara merata, dengan hotel kelas atas relatif lebih mampu menangkap peningkatan permintaan dibandingkan hotel bintang 1 dan bintang 3. Seluruh klasifikasi hotel berbintang mengalami peningkatan TPK dibandingkan Triwulan I-2026. Hotel bintang 5 mencatat penguatan paling signifikan sebesar 10,51

persen poin, diikuti bintang 4 sebesar 4,00 persen poin, bintang 3 sebesar 3,21 persen poin, bintang 2 sebesar 1,89 persen poin, dan bintang 1 sebesar 1,97 persen poin.



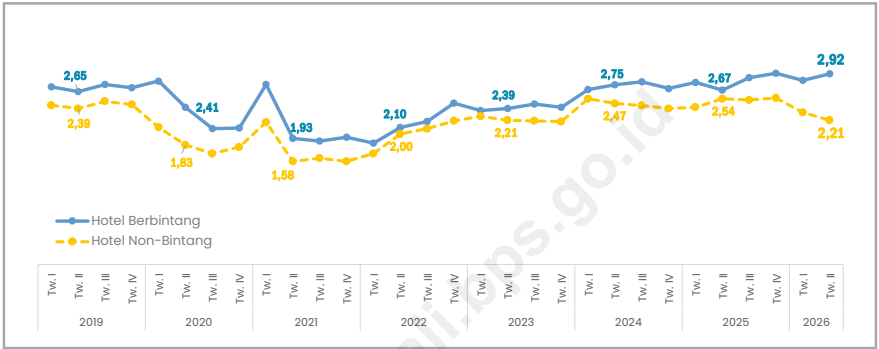
Gambar 4.3 Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Menurut Jenis Hotel di Provinsi Bali (persen), Triwulan I-2019 s.d. Triwulan II-2026



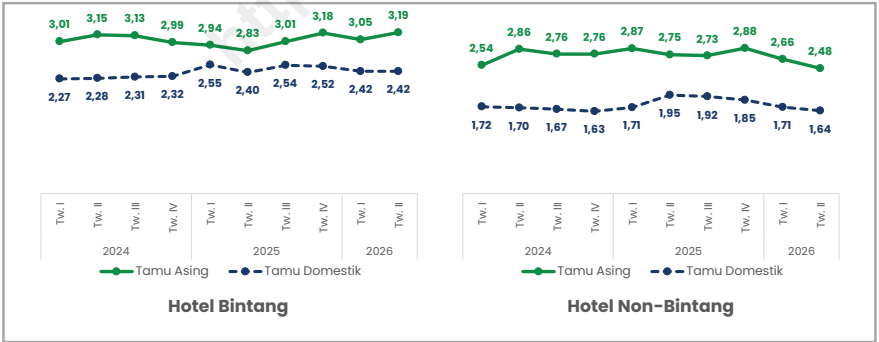
Gambar 4.4 Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Menurut Klasifikasi Hotel Berbintang di Provinsi Bali (persen), Triwulan I-2025 s.d. Triwulan II-2026

Berbeda dengan TPK, indikator rata-rata lama menginap (RLM) memberikan sinyal yang lebih positif pada hotel berbintang. RLM hotel berbintang pada Triwulan II-2026 tercatat 2,92 malam, meningkat 0,25 malam dibandingkan Triwulan II-2025 (Gambar 4.5). Sementara itu, RLM hotel nonbintang turun 0,33 malam menjadi 2,21 malam. Kombinasi TPK

yang melemah dan RLM yang juga turun secara *year-on-year* pada hotel nonbintang mengindikasikan bahwa segmen ini tidak hanya mengalami penurunan hunian, tetapi juga menghadapi penurunan durasi menginap. Kondisi tersebut memberikan tekanan ganda terhadap pendapatan dan keberlanjutan usaha hotel nonbintang di Bali. Pola tersebut menunjukkan pemulihan aktivitas akomodasi lebih kuat pada hotel berbintang, sementara hotel nonbintang masih menghadapi tekanan.



Gambar 4.5 Perkembangan Rata-Rata Lama Menginap Menurut Kategori Hotel di Provinsi Bali (malam), Triwulan I-2019 s.d. Triwulan II-2026



Gambar 4.6 Perkembangan Rata-Rata Lama Menginap Menurut Kategori Hotel dan Tamu di Provinsi Bali (malam), Triwulan I-2024 s.d. Triwulan II-2026

Berdasarkan kategori tamu, RLM tamu asing konsisten lebih panjang dibandingkan tamu domestik pada hotel berbintang maupun nonbintang (Gambar 4.6). Pada hotel berbintang, RLM tamu asing pada Triwulan II-2026 mencapai 3,19 malam, meningkat 0,36 malam dibandingkan Triwulan II-2025 yang sebesar 2,83 malam. Sebaliknya, RLM tamu domestik naik tipis 0,02 malam menjadi 2,42 malam. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tamu asing cenderung memiliki durasi tinggal yang lebih panjang, terutama pada akomodasi berbintang yang menawarkan fasilitas dan pengalaman yang lebih lengkap. Sementara itu, pada hotel nonbintang, RLM tamu asing turun dari 2,75 malam menjadi 2,48 malam, sedangkan tamu domestik menurun dari 1,95 malam menjadi 1,64 malam. Penurunan yang lebih dalam pada kelompok domestik mengindikasikan bahwa akomodasi nonbintang menghadapi tantangan lebih besar dalam mempertahankan lama tinggal tamu domestik di tengah mobilitas wisatawan yang semakin tinggi.

Secara keseluruhan, perkembangan pariwisata Bali pada Triwulan II-2026 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan lama tinggal pada seluruh jenis akomodasi. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,74 juta kunjungan, meningkat 18,41 persen dibandingkan Triwulan I-2026, meskipun masih terkontraksi 5,17 persen secara *year-on-year*. Pada saat yang sama, RLM tamu asing di hotel berbintang meningkat menjadi 3,19 malam, sedangkan RLM tamu domestik masih stagnan pada kisaran 2,40 malam. Sebaliknya, RLM tamu asing dan domestik di hotel nonbintang masing-masing turun menjadi 2,48 malam dan 1,64 malam. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas wisatawan lebih banyak memberikan dorongan terhadap akomodasi berbintang, sementara segmen nonbintang menghadapi tantangan dalam mempertahankan

durasi tinggal tamu. Jika dikaitkan dengan dinamika TPK, kondisi tersebut menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah wisatawan tidak serta-merta meningkatkan utilisasi kapasitas akomodasi secara merata. Dengan demikian, tantangan pariwisata Bali ke depan bukan lagi sekadar mengejar volume kunjungan, melainkan meningkatkan *value per visitor* melalui perpanjangan lama tinggal, penguatan daya tarik akomodasi, dan peningkatan kualitas pengalaman wisatawan. Arah pengembangan tersebut penting agar peningkatan kunjungan wisatawan dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar dan tersebar pada berbagai segmen usaha akomodasi.

<https://bali.bps.go.id>



Bab V

Ekspor & Impor

Ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara melakukan penjualan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri.

- Nilai barang yang dicatat untuk statistik ekspor adalah nilai *Free On Board/FOB* (dalam satuan dolar Amerika). FOB adalah harga di mana barang sudah berada di atas kapal di pelabuhan eksportir dan siap diekspor.
- Negara tujuan ekspor adalah negara di mana barang tersebut diperkirakan akan dikonsumsi atau diperdagangkan.

Data ekspor menggunakan dokumen ekspor atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diisi langsung oleh eksportir yang telah diberikan ijin oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mendatangkan barang-barang dari luar negeri untuk dijual atau digunakan di dalam negeri.

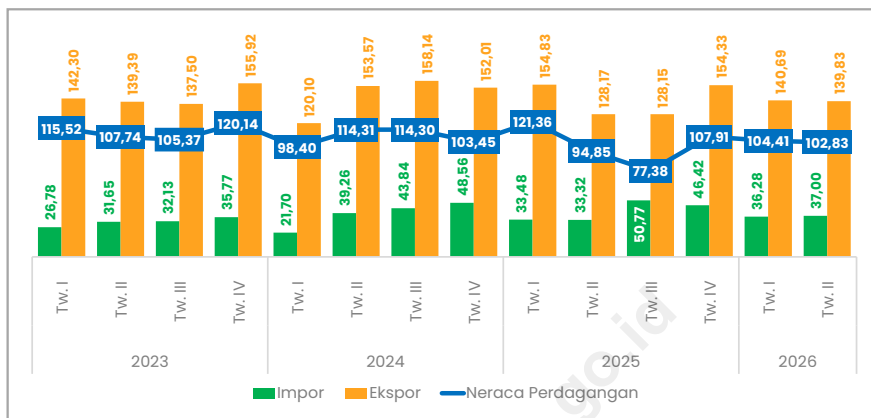
- Nilai barang yang dicatat untuk impor adalah nilai *Cost, Insurance & Freight/CIF* (dalam satuan dolar Amerika).
- Negara asal impor adalah negara di mana barang-barang tersebut dikeluarkan setelah diperiksa pejabat Bea dan Cukai negara yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Data impor menggunakan dokumen impor (Pemberitahuan Impor Barang (PIB-BC 2.0), Pemberitahuan Pengangkutan Barang Impor (PPBI-BC 2.3), Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK-BC 2.1), dan Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ) yang diisi oleh importir dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sesuai SK Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997.

Data ekspor dan impor dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Pencatatan barang oleh Kantor Bea dan Cukai dikategorikan ke dalam kode HS (*Harmonized System*).

Bab V

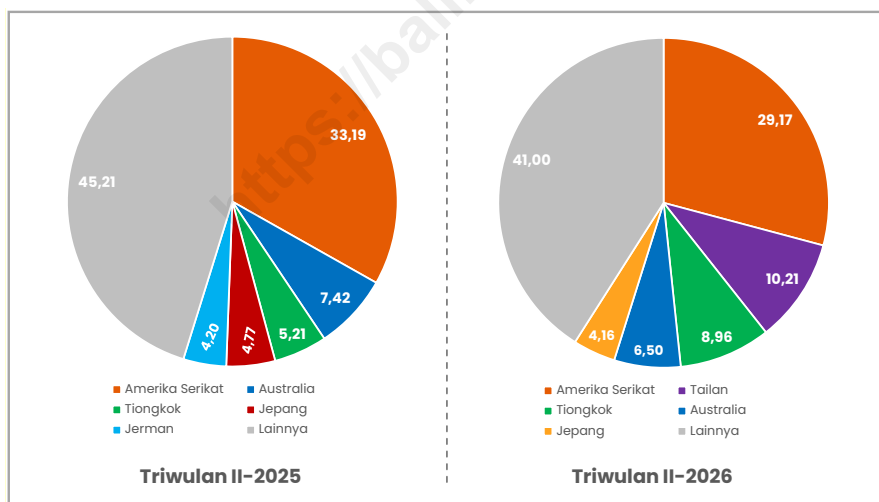
Ekspor dan Impor



Gambar 5.1 Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Provinsi Bali (juta US\$), Triwulan I-2023 s.d. Triwulan II-2026

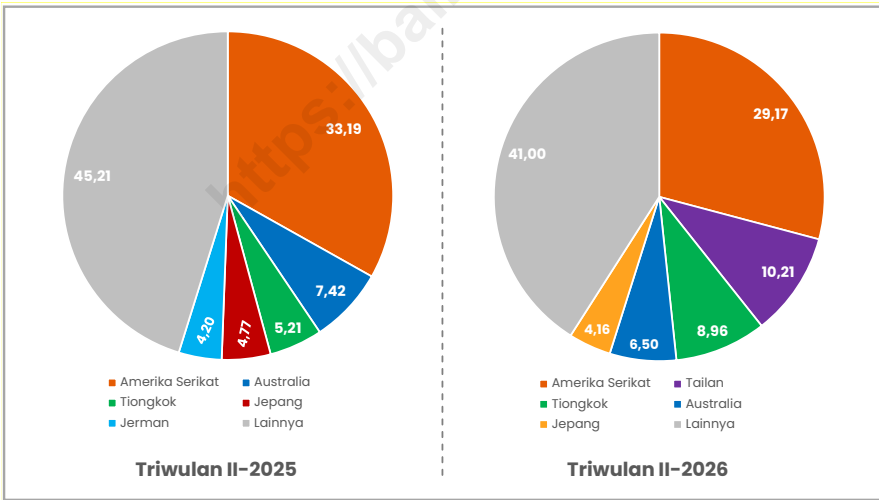
Neraca perdagangan Provinsi Bali pada Triwulan II-2026 kembali mencatatkan surplus sebesar US\$102,83 juta, menurun 1,51 persen dibandingkan Triwulan I-2026 yang mencapai US\$104,41 juta (Gambar 5.1). Penurunan surplus tersebut terjadi seiring dengan menurunnya nilai ekspor barang dari US\$140,69 juta menjadi US\$139,83 juta atau sebesar 0,61 persen. Sementara itu, nilai impor barang meningkat dari US\$36,28 juta menjadi US\$37,00 juta atau sebesar 1,98 persen. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kinerja perdagangan luar negeri Bali masih berada dalam kondisi positif, meskipun surplus sedikit tertekan akibat melemahnya ekspor dan meningkatnya impor. Namun demikian, surplus yang tetap berada di atas US\$100 juta menunjukkan bahwa ekspor masih mampu menjaga posisi perdagangan Bali tetap surplus pada Triwulan II-2026.

Jika dibandingkan secara *year-on-year*, perkembangan perdagangan luar negeri Bali pada Triwulan II-2026 justru menunjukkan perbaikan. Nilai ekspor meningkat sebesar 9,12 persen, sementara impor menurun cukup signifikan sedalam 27,12 persen. Kondisi tersebut mendorong surplus neraca perdagangan meningkat sebesar 32,89 persen, dari US\$77,38 juta pada Triwulan II-2025 menjadi US\$102,83 juta pada Triwulan II-2026. Perkembangan ini menunjukkan bahwa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, kinerja perdagangan luar negeri Bali mengalami penguatan, terutama karena pertumbuhan ekspor yang disertai dengan penurunan impor. Meskipun demikian, peningkatan surplus yang terutama didorong oleh kontraksi impor tetap perlu dicermati lebih lanjut melalui komposisi impor berdasarkan golongan penggunaan barang, untuk melihat apakah penurunan tersebut mencerminkan berkurangnya kebutuhan impor atau perubahan struktur aktivitas ekonomi.



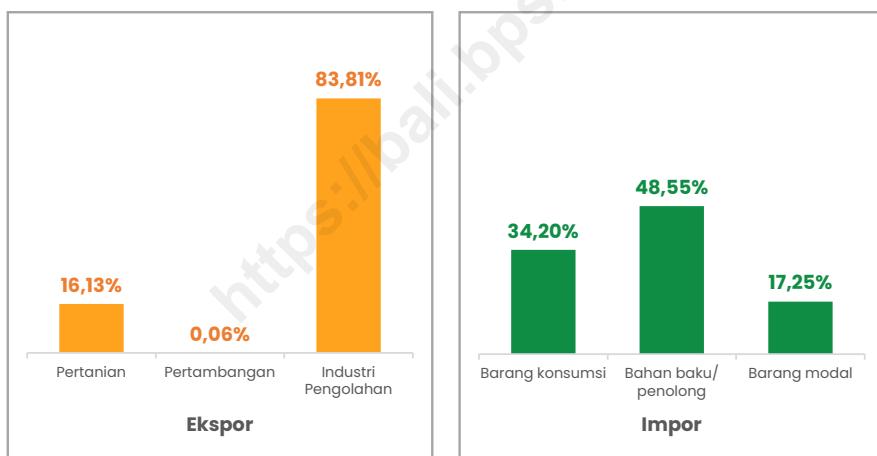
Gambar 5.2 Persentase Ekspor Provinsi Bali Menurut Lima Negara/ Wilayah/Entitas Tertentu Tujuan Utama, Triwulan II-2025 dan Triwulan II-2026

Sebagaimana Gambar 5.2, Amerika Serikat masih menjadi tujuan utama ekspor Bali pada Triwulan II-2026, meskipun pangsaanya menurun dari 33,19 persen pada Triwulan II-2025 menjadi 29,17 persen atau berkurang 4,02 persen poin. Tiongkok mengalami peningkatan pangsa ekspor dari 5,21 persen menjadi 8,96 persen, atau bertambah 3,75 persen poin, dengan tetap menduduki peringkat ketiga terbesar tujuan ekspor Bali. Sementara itu, pangsa ekspor ke Australia justru mengalami pergeseran dari peringkat kedua pada Triwulan II-2025 turun ke peringkat empat pada Triwulan II-2026 dengan penurunan persentase nilai ekspor sedalam 0,92 persen. Pergeseran tersebut mengindikasikan bahwa tujuan ekspor Bali mulai semakin beragam. Peningkatan pangsa pasar Tiongkok menunjukkan peluang penguatan pasar Asia, sehingga diversifikasi pasar perlu terus didorong untuk mengurangi ketergantungan dan menjaga stabilitas ekspor Bali.



Gambar 5.2 Persentase Ekspor Provinsi Bali Menurut Lima Negara/ Wilayah/Entitas Tertentu Tujuan Utama, Triwulan II-2025 dan Triwulan II-2026

Tidak jauh berbeda dengan kondisi ekspor, komposisi negara/wilayah/entitas tertentu asal impor barang ke Provinsi Bali masih didominasi Tiongkok dan Amerika Serikat, namun dengan peningkatan 0,40 persen dari Tiongkok dan penurunan 6,71 persen dari Amerika Serikat (Gambar 5.3). Selain kedua negara tersebut, sumber impor terbesar kedua berasal dari Australia dengan sumbangan persentase impor meningkat dari 6,36 persen pada Triwulan II-2025 menjadi 8,17 persen pada Triwulan II-2026. Di sisi lain, menurunnya porsi impor dari Jerman dan masuknya komoditas impor dari Singapura ke dalam lima besar asal negara impor ke Provinsi Bali menandakan bahwa sumber impor Bali semakin beragam dan dinamis sekaligus membuka peluang penguatan jejaring perdagangan dengan pasar alternatif untuk meningkatkan ketahanan pasokan.



Gambar 5.4 Persentase Ekspor Menurut Sektor dan Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang di Provinsi Bali, Triwulan II-2026

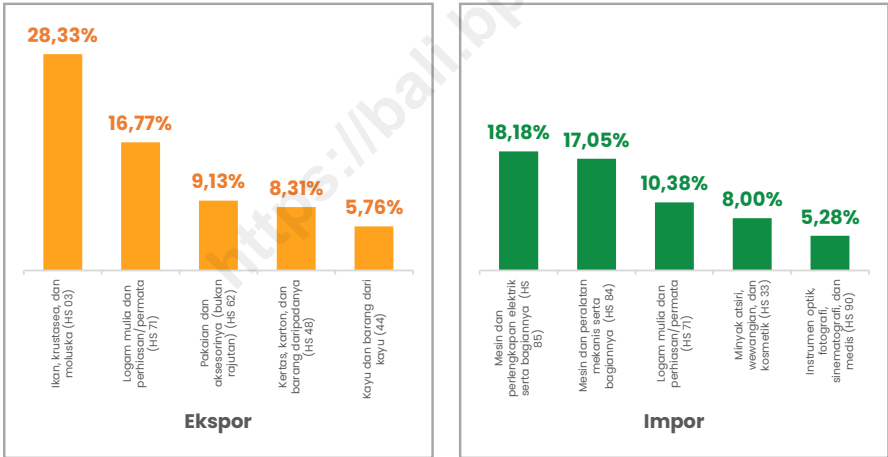
Lebih lanjut, struktur ekspor Provinsi Bali menurut sektor pada Triwulan II-2026 dapat dilihat pada Gambar 5.4. Sektor Industri Pengolahan menjadi penyumbang terbesar ekspor dengan kontribusi 83,81 persen atau

sekitar US\$117,19 juta, jauh lebih dominan dibandingkan sektor lainnya. Sementara itu, Sektor Pertanian menyumbang 16,13 persen atau sekitar US\$22,55 juta, sedangkan Sektor Pertambangan hanya memberikan kontribusi sebesar 0,06 persen atau sekitar US\$0,08 juta. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa ekspor Bali pada Triwulan II-2026 didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan, yang mengindikasikan semakin pentingnya aktivitas pengolahan dalam mendukung kinerja ekspor daerah. Kondisi ini sekaligus menunjukkan peluang untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah produk, sembari menjaga daya saing komoditas pertanian agar struktur ekspor Bali semakin beragam.

Dari sisi impor, Gambar 5.4 menunjukkan bahwa bahan baku/penolong mendominasi struktur impor dengan kontribusi 48,55 persen atau sekitar US\$17,96 juta. Selanjutnya, impor barang konsumsi menyumbang 34,20 persen atau sekitar US\$12,65 juta, sedangkan barang modal memiliki kontribusi 17,25 persen atau sekitar US\$6,38 juta. Besarnya porsi bahan baku/penolong memberikan gambaran bahwa hampir separuh impor Bali masih berkaitan dengan kebutuhan input produksi, sehingga impor yang terjadi relatif memiliki karakter produktif dalam mendukung aktivitas ekonomi domestik. Di sisi lain, proporsi barang konsumsi yang masih mencapai lebih dari sepertiga total impor tetap perlu dicermati karena dapat mencerminkan adanya kebutuhan domestik yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Dengan demikian, surplus perdagangan Bali pada Triwulan II-2026 tidak hanya perlu dilihat dari besarnya surplus, tetapi juga dari struktur ekspor dan impor yang membentuknya.

Jika dilihat berdasarkan komoditas sebagaimana Gambar 5.5, komoditas Ikan, Krustasea, dan Moluska (HS 03) masih menjadi komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar pada Triwulan II-2026, yaitu sebesar

28,33 persen. Selanjutnya, komoditas logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) menyumbang 16,77 persen; komoditas pakaian dan aksesorisnya (bukan rajutan) (HS 62) sebesar 9,13 persen; komoditas kertas, karton, dan barang daripadanya (HS 48) sebesar 8,31 persen; serta komoditas perabotan, lampu, dan alat penerangan (HS 94) sebesar 5,76 persen. Kelima komoditas tersebut secara kumulatif menyumbang sekitar 68,30 persen dari total ekspor, menunjukkan bahwa struktur ekspor Bali masih cukup terkonsentrasi pada sejumlah komoditas utama. Kondisi ini menjadi kekuatan karena Bali memiliki komoditas unggulan yang mampu menembus pasar internasional, namun sekaligus menjadi tantangan karena perubahan permintaan global atau gangguan produksi pada komoditas utama dapat memberikan dampak cukup besar terhadap kinerja ekspor secara keseluruhan.



Gambar 5.5 Persentase Ekspor dan Impor Provinsi Bali Menurut Lima Komoditas Utama, Triwulan II-2026

Dari sisi impor, komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) memiliki kontribusi terbesar sebesar 18,18 persen, diikuti komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) sebesar 17,05 persen; komoditas logam mulia dan perhiasan/permata (HS

71) sebesar 10,38 persen; komoditas minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik (HS 33) sebesar 8,00 persen; serta komoditas barang dari kulit samak (HS 42) sebesar 5,28 persen. Dominannya komoditas HS 84 dan HS 85 menunjukkan bahwa impor Bali masih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan mesin, peralatan, dan teknologi yang mendukung aktivitas produksi. Menariknya, Logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) juga masuk dalam lima besar komoditas ekspor dan impor, yang dapat mencerminkan pola *two-way trade*, yaitu impor bahan atau komponen untuk kemudian diolah menjadi produk bernilai tambah dan diekspor kembali. Dengan demikian, struktur impor tersebut tidak seluruhnya mencerminkan ketergantungan konsumtif, tetapi juga menunjukkan keterkaitan dengan aktivitas produksi. Namun, tingginya kebutuhan terhadap mesin dan peralatan dari luar negeri sekaligus menunjukkan masih adanya ruang untuk memperkuat kapasitas produksi dan rantai pasok domestik agar aktivitas ekonomi Bali semakin mampu menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.

Sebagai penutup, perdagangan luar negeri Provinsi Bali pada Triwulan II-2026 tetap berada dalam kondisi surplus, meskipun nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan Triwulan II-2025, kinerja perdagangan menunjukkan perbaikan yang cukup kuat, tercermin dari meningkatnya ekspor dan menurunnya impor. Ikan, Krustasea, dan Moluska (HS 03) masih menjadi komoditas utama penopang ekspor, sementara tingginya kontribusi beberapa komoditas utama menunjukkan bahwa struktur ekspor Bali masih relatif terkonsentrasi. Pada saat yang sama, dominasi mesin dan peralatan dalam impor mengindikasikan bahwa aktivitas produksi di Bali masih membutuhkan input dan teknologi dari luar negeri. Ke depan, tantangan perdagangan Bali bukan hanya mempertahankan surplus, tetapi

juga meningkatkan kualitas dan ketahanan struktur perdagangan. Penguatan industri pengolahan, diversifikasi komoditas dan pasar ekspor, serta peningkatan nilai tambah produk menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu. Di sisi impor, penguatan kapasitas produksi dan rantai pasok domestik dapat secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap mesin maupun input dari luar negeri. Dengan strategi tersebut, surplus perdagangan diharapkan tidak sekadar menjadi capaian nominal, tetapi juga mencerminkan struktur perdagangan yang semakin produktif, beragam, dan berdaya tahan terhadap perubahan ekonomi global.

<https://bali.bps.go.id>



Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2026. *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Bali Juni 2026*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2026. *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Bali Juni 2026*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2026. *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Bali Juni 2026*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2026. *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Juni 2026*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2026. *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan II 2026*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2026. *Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Mei 2026*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 80226
Telp.: (0361) 238159, Fax.: (0361) 238162
Email: bps5100@bps.go.id
Homepage: <http://bali.bps.go.id>

